



Dinas Kelautan  
dan Perikanan  
KABUPATEN SUKABUMI

# **RENCANA KERJA**

## **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

### **KABUPATEN SUKABUMI**

#### **TAHUN 2018**



KOMPLEK PERKANTORAN CIMAJA JL. RAYA CISOLOK KM. 11  
TELP. (0266) 436423, 436424 CIMAJA - PALABUHANRATU

**LAMPIRAN**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.. .....	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	34
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	40
3.3 Program dan Kegiatan .....	41

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi PD.....	45
4.2 Tujuan dan Sasaran PD .....	51
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	51
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Capaian Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 .....	11
2.	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 .....	14
3.	Pendapatan Asli Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan TA 2017 .....	28
4.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi.....	31
5.	Tujuan Sasaran,Strategi,Program dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi .....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018 .....	54

## **DAFTAR GAMBAR**

No.	Judul	Halaman
1.	Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kab. Sukabumi .....	46

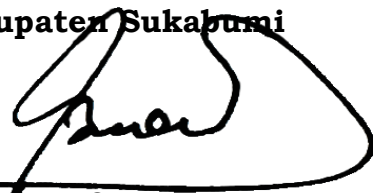
## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi tahun 2018 ini merupakan rangkaian kegiatan perencanaan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dan oleh karenanya memuat hal-hal garis besar. Namun demikian, sekalipun disusun dalam perencanaan global, akan tetapi idealnya bisa mencerminkan kinerja. Artinya segala perencanaan kegiatan harus mempunyai keterukuran sehingga target yang dicapai kapanpun akan dapat dievaluasi sekaligus diadakan perbaikan manakala adanya kebiasaan dari yang telah ditetapkan. Memang relatif sulit karena selama perjalanannya mengalami perubahan dan dinamika sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi dan kebutuhan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka penyusunannya diupayakan bersifat fleksible.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan kiranya bersedia menyumbangkan gagasan bagi perbaikan dan penyempurnaan berikutnya.

Palabuhanratu, Juli 2018

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Sukabumi**



**Ir. H. DADANG BUDIMAN, MM**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 196305031988031008



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) SKPD

merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja SKPD), mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4)
33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45)
34. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 45);
35. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 69);

36. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Ddaerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 adalah :

1. Sebagai Dokumen perencanaan pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Sukabumi untuk periode 1(satu) tahun.
2. Sebagai penjabaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Sukabumi yang mengacu pada RKPD Kabupaten Sukabumi agar proses pelaksanaan pembangunan lebih terencana dan terarah.

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 antara lain :

1. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas kelautan dan Perikanan kabupaten Sukabumi tahun 2018.
2. Menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Sukabumi sesuai Tupoksinya tahun 2018,
3. Mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2018 disusun dengan sistematika :

BAB I : PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan



peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dalam bagian ini diuraikan hasil rancangan awal RKPD apakah telah sesuai dengan yang diusulkan oleh PD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

### BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

**BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi SKPD, berisikan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD,

4.3 Strategi dan Kebijakan

**BAB IV : PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Berdasarkan Target Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, pada Tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi memiliki 4 (Empat) Indikator Kinerja. Sebagian besar indikator kinerja sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Renstra SKPD 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 dengan beberapa tambahan indikator kinerja yang dianggap relevan untuk dicantumkan. Pencapaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada tahun 2017. Hasil perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian Tahun 2017 terhadap target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya Pendapatan Pengolah Ikan	100%	10	10,9	109,4	10	69,47
		Meningkatnya pendapatan nelayan	66,5%	10	12,59	125,83	10	46,51
		Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan	99,3%	10	7,12	71,21	10	66,02
2	Terwujudnya sentra perikanan budidaya air tawar, laut, dan pengolahan hasil perikanan	Cluster Budidaya	100%	6	6	100	9	61,11

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai dengan skala penilaian kinerja sangat tinggi yaitu di atas 101,52%, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis dengan skala penilaian kinerja yang masih rendah. Terhadap sasaran yang belum mencapai target/skala penilaian yang masih rendah dilakukan analisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Berdasarkan Tabel. 1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi peningkatan pendapatan pengolah ikan adalah 109,40% atau pendapatan pengolah ikan meningkat 10,94%. Pendapatan pengolah ikan tahun 2015 Rp. 2.114.700,- / bulan, tahun 2016 2.346.000,- dan tahun tahun 2017 naik Rp.256.649,- menjadi Rp. 2.602.649,-. Realisasi peningkatan pendapatan pengolah ikan didukung oleh jumlah pengolah ikan 1.566 orang dan produksi 15.081 ton.
2. Realisasi peningkatkan pendapatan nelayan adalah 125,83% atau pendapatan nelayan meningkat 12,58%. Realisasi pendapatan nelayan Rp. 1.994.178,-/bulan atau meningkat Rp. 222.878,-/bulan. Realisasi peningkatan pendapatan nelayan didukung oleh jumlah nelayan 9.033 orang dan produksi 10.317,57 ton.
3. Realisasi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan adalah 71,2% dengan realisasi pendapatan Rp. 3.329.481,-/bulan atau meningkat Rp. 221.321,-/bulan. Realisasi pendapatan pada tahun 2016 adalah Rp. 3.108.160,-, untuk mencapai target meningkat 10% seharusnya peningkatan pendapatan pembudidaya ikan adalah Rp. 310.816,-. Sehingga peningkatan pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2017 adalah 7,12%. Realisasi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan didukung oleh jumlah pembudidaya ikan 29.602 orang dan produksi ikan konsumsi 33.857,06 ton, produksi benih 4.102.956.182 ekor, produksi ikan hias 104.836.732 ekor
4. Realisasi terwujudnya Cluster Perikanan Budidaya adalah 100% dengan realisasi lokasi 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cicurug, Cidahu, Cisaat, Palabuhanratu, Cibitung, Tegalbueled.

Realisasi kinerja sasaran apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebagai berikut :

1. Pendapatan/bulan pengolah ikan target akhir adalah Rp. 3.746.316, realisasi tahun 2017 adalah Rp. 2.602.649, sehingga capaian tahun 2017 terhadap target akhir RPJMD adalah 69,47%
2. Pendapatan/bulan nelayan target akhir adalah Rp. 4.287.585,-, realisasi tahun 2017 adalah Rp. 1.994.178, sehingga capaian tahun 2017 terhadap target akhir RPJMD adalah 46,51%
3. Pendapatan/bulan pembudidaya ikan target akhir adalah Rp. 5.043.191,-, realisasi tahun 2017 adalah Rp. 3.329.481,-, sehingga capaian tahun 2017 terhadap target akhir RPJMD adalah 66,02%
4. Jumlah Kluster budidaya perikanan target akhir adalah 18 lokasi kecamatan dan realisasi komulatif tahun 2017 adalah 11 maka capaian tahun 2017 terhadap target akhir RPJMD adalah 61,11%

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel. 2

Tabel 2. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program RPJMD (2016-2021)	Kegiatan	Keuangan (Rp x 1000)		
				Target	Realisasi	%			Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya Pendapatan Nelayan	%	10	12,58	125,8	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pengelolaan TPI	512.072.500	509.901.000	99,57
								Pemanfaatan dan Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara terpadu dan berkelanjutan	167.400.000	164.565.000	98,31
								Peningkatan Kapasitas Nelayan	173.775.000	173.706.000	99,96
								Pencatatan Armada Penangkapan Ikan	118.954.000	118.954.000	100%
								Pemasangan Turap Penahan Tanah TPI Cikembang	186.729.000	183.649.000	98,35
								Fasilitasi Air Bersih	110.450.000	109.948.000	99,55
								Identifikasi, Verifikasi dan Validasi SeHAT, Listrik Nelayan dan Rutilahu	426.051.000	426.051.000	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program RPJMD (2016-2021)	Kegiatan	Keuangan (Rp x 1000)		
				Target	Realisasi	%			Pagu	Realisasi	%
		Meningkatnya Pendapatan Pembudidaya Ikan	%	10	7,12	71,2	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	Pengembangan Minapolitan Melalui Optimalisasi UPTD BBI	268.840.000	268.750.000	99,97
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan	790.590.000	783.556.000	99,11
								Pelatihan dan Pembinaan Pembudidaya Ikan	233.218.000	232.538.000	99,71
								Fasilitasi Kontes Ikan Hias	120.000.000	116.334.000	96,95
								Perbaikan Kualitas Induk	163.914.000	162.954.000	99,41
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembesaran Ikan	84.613.000	83.962.000	99,23

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program RPJMD (2016-2021)	Kegiatan	Keuangan (Rp x 1000)		
				Target	Realisasi	%			Pagu	Realisasi	%
2	Terwujudnya Sentra Perikanan Budidaya	Jumlah Lokasi Yang Dicanangkan Untuk Cluster Perikanan Budidaya	Lokasi	6	6	100		Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan	84.455.000	84.455.000	100
	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan	Meningkatnya Pendapatan Pengolah Hasil Perikanan	%	10	10,93	109,3	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan</b>	Diversifikasi Produk Perikanan dan Diversifikasi Kemasan	119.758.000	119.718.000	99,97
								Identifikasi, Verifikasi dan Validasi SeHAT, Listrik Nelayan dan Rutilahu	426.051.000	426.051.000	100
								Pengembangan Inkubator Mina Bisnis	16.900.000	16.900.000	100
								Pengembangan Jaringan dan Distribusi Pemasaran	256.850.000	256.680.000	99,93
								Peningkatan Kelembagaan UMKM	121.685.000	121.285.000	99,67
								Peningkatan Mutu Produk Perikanan	60.434.000	58.224.000	96,34



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program RPJMD (2016-2021)	Kegiatan	Keuangan (Rp x 1000)		
				Target	Realisasi	%			Pagu	Realisasi	%
								Revitalisasi pasar Ikan Cibaraja	291.000.000	289.002.000	99,31
								Pembangunan Pasar Ikan	205.000.000	203.902.000	99,46
								Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Reguler 2017)	1.303.000.000	1.252.796.000	96,15
								Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Pendamping)	32.575.000	32.240.000	98,97
								Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan (SILPA DAK 2016)	75.871.679	75.334.000	99,29

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diselaraskan dengan Program Pengembangan Perikanan Tangkap terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.381 643.500,- dan terealisasi sebesar Rp 1.372.986.000,- atau 99,37%. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan TPI dengan anggaran sebesar Rp 512.072.500,- terealisasi sebesar Rp509.901.000,- atau 99%. Keluaran dari kegiatan ini adalah:
  - a. Pembinaan administrasi TPI 1 Kali
  - b. Pertemuan Rutin UPTD TPI 12 Kali
  - c. Timbangan Gantung 12 Buah
  - d. Sosialisasi TPI 6 Kali/130 Orang
  - e. Instalasi Listrik Ciwaru 1 Paket
  - f. Sarana Peningkatan Pelayanan Publik TPI Palabuhanratu
  
2. Pemanfaatan dan Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara terpadu dan berkelanjutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 167.400.000,- Realisasi Rp164.565.000,- atau 98,31%%, dengan Keluaran sebagai berikut :
  - a. Rakor Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
  - b. Rakor Pengelolaan PUD
  - c. Kaji Terap Pengganti Alat Tangkap Ikan yang dilarang
  - d. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
  - e. Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan
  - f. Honorarium Perangkat Kegiatan
  - g. Belanja ATK
  - h. Belanja Fasilitasi Restocking PUD
  - i. Belanja Penggandaan Laporan Akhir Kegiatan
  - j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
  - k. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

3. Peningkatan Kapasitas Nelayan dengan anggaran sebesar Rp 173.775.000,- terealisasi sebesar Rp 173.706.000,- atau 99,96%. Keluaran dari kegiatan ini adalah:
  - a. Pelatihan Penangkapan Ikan di Rumpon Laut Dangkal
  - b. Pelatihan Pengelolaan Alat Bantu Rumpon
  - c. Pengamanan Mobilitas Nelayan/ Audiensi
  - d. Belanja ATK
  - e. Sewa Kendaraan Konsultasi dan Koordinasi
  - f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
  - g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
  
4. Pencatatan Armada Penangkapan Ikan dengan anggaran sebesar Rp 118.954.000,- terealisasi sebesar Rp 118.954.000,- atau 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah:
  - a. Data Armada Penangkapan Ikan 1.000 Kapal
  
5. Pemasangan Turap Penahan Tanah TPI Cikembang dengan anggaran sebesar Rp 186.729.000,- terealisasi sebesar Rp. 183.649.000,- atau 98,35 % Keluaran dari kegiatan ini adalah :
  - a. Perkuatan Jembatan TPI Cikembang 1 Paket
  - b. Talud/Penahan Tanah TPI Legonpari 1 Paket
  
6. Fasilitasi Air Bersih dengan anggaran sebesar : Rp. 110.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 109.948.000,- atau 99,55% dengan keluaran sebagai berikut :
  - a. Pengadaan Air Bersih TPI Cikembang 1 Paket
  - b. Portal ke lokasi TPI Cikembang 1 Unit
  - c. Pemasangan Teralis di Kantor TPI Cikembang 1 Paket
  
7. Pengembangan Perikanan Tangkap melalui Kegiatan Kaji Terap Teknologi Penangkapan Ikan, Pengelolaan PPI dengan anggaran sebesar : Rp. 112.263.000,- terealisasi sebesar Rp. 112.263.000,- atau 100% dengan keluaran sebagai berikut :
  - a. Sosialisasi PPI Cikembang dilaksanakan 3 Kali

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang diselaraskan dengan Program Pengembangan Budidaya Perikanan terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.782.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.782.080.000,- atau 99,24%. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Minapolitan Melalui Optimalisasi UPTD BBI dengan anggaran sebesar Rp. 268.840.000,- terealisasi sebesar Rp 268.750.000,- atau 99,97%, dengan keluaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya Produksi Ikan dan Calon Induk Ikan 10%
  - b. Target PAD Rp.115.000.000
  - c. Teralisasinya Perbaikan Kolam Induk Ikan Nila dan Saluran pembuangan air kolam 1 Kolam dan 1 Saluran
  - d. Terealisasinya Rehab Hatchery Indoor 1 Unit
  
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 790.590.000,- terealisasi sebesar Rp 783.556.000,- atau 99,11%, dengan keluaran sebagai berikut:
  - a. Tersedianya gambar rencana dan spesifikasi teknis Perencanaan BBI Tonjong 1 Dokumen
  - b. Tersedianya Engineer Estimate (EE) untuk rujukan perhitungan Owner Estimate (OE) dan/atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 1 Dokumen
  - c. Tersedianya Dokumen Pengadaan untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan BBI Tonjong 1 Dokumen
  - d. Meningkatnya produksi benih ikan dan calon induk 10%
  - e. Target PAD Rp 115.000.000
  - f. Kolam induk ikan nila dan saluran pembuangan air kolam berfungsi dengan baik 1 Kolam dan 1 Saluran
  - g. Hatchery Indoor layak pakai Unit
  
3. Pelatihan dan Pembinaan Pembudidaya Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 233.218.000,- terealisasi sebesar Rp 232.538.000,- atau 99,71 %, dengan keluaran sebagai berikut:
  - a. Desiminasi Teknologi 2 Kali
  - b. Pelatihan Budidaya Ikan 2 Kali
  - c. Kaji Terap Pembudidaya Ikan 1 Kali
  - d. Liflet 3000 Lembar
  - e. Pasilitasi Teknologi 1 Paket
  - f. Buku Pintar 100 Eksemplar
  - g. Rakor Shrimp Java club Jabar Banten 1 Kali
  
4. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 84.455.000,- terealisasi sebesar Rp84.455.000,- atau 100,00%, dengan keluaran sebagai berikut:

- a. Pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan @ 30 orang di Kecamatan Caringin dan Kec. Simpenan
- b. Pembinaan penggunaan oikb dan pakan 30 orang di Kecamatan Cisaat
- c. Pengujian kualitas air 20 lokasi :
  1. Komplek Pasar Ikan Cibaraja
  2. Kelompok Berkah Lamping Parakansalak
  3. Kelompok Hikamuci Kabandungan
  4. Kelompok Mulus Rahayu Cikakak
  5. BBI Cimaja Cisolok
  6. Kelompok Berkah Ikan Sejuk Cicurug
  7. Kelompok Arwana Kalapanunggal
  8. Kelompok Alam Lestari Cibadak
  9. Kelompok Mawar Parakansalak
  10. Kelompok Bina Mandiri Cibadak
  11. Kelompok Mizumi Caringin
  12. Kelompok Karya Mandiri Cisaat
  13. Tambak Noerwy Aquafarm Ciracap
  14. Tambak Anugrah Buwana Indonesia Surade
  15. Kelompok Mina Raja Cisaat
  16. Kelompok Mina Mekar Caringin
  17. Ponpes Sunanul Huda Cisaat
  18. Ponpes Assalafiah I Cicantayan
  19. UPR An. Hendrawan Sukaraja
  20. UPR An. H. Deden Gunungguruh
  21. Kelompok Sejahtera Cisaat
- d. Monitoring peredaran OIKB :
  1. Kec. Cisaat
  2. Kec. Cibadak
  3. Kec. Palabuhanratu
  4. Kec. Nyalindung
  5. Kec. Caringin
  6. Kec. Nagrak
  7. Kec. Sukaraja

8. Kec. Cicurug
  9. Kec. Sukabumi
  10. Kec. Parungkuda
  11. Kec. Bojonggenteng
  12. Kec. Parakansalak
- e. Pengujian hama penyakit ikan 3 kali :
1. Ikan bawal di Kec. parakansalak,
  2. Ikan lele di Kec. Cibadak dan Cisaat
  3. Ikan Gurame di kec. Cisaat
- f. Alat test kit kualitas air in situ 1 paket, yang terdiri :
- Test kit NH3 @ 1 buah
  - Test kit NO2 @ 1 buah
  - Test kit NO3 @ 1 buah
  - Test kit Fe @ 1 buah
  - Test kit KH @ 1 buah
  - Test kit Cl @ 1 buah
5. Perbaikan Kualitas Induk dengan alokasi anggaran sebesar Rp 163.914.000,- terealisasi sebesar Rp162.954.000,- atau 99,41%, dengan keluaran sebagai berikut:
- a. Pembinaan Sertifikasi 1 Kali
  - b. Fasilitasi Sertifikasi CPIB 10 Kelompok
  - c. Penyusunan Dokumen SPO 4 Kali
  - d. Induk Ikan Mas 100 Kg
  - e. Induk Ikan Nila 10 Paket
  - f. Induk Ikan Koi 1 Paket
  - g. Induk Ikan Lele 50 paket
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembesaran Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 84.613.000,- terealisasi sebesar Rp83.962.000 atau 99,2%, dengan keluaran sebagai berikut:
- a. Perbaikan alat uji kualitas air 1 unit
  - b. Benih ikan nila 77.000 ekor
  - c. Benih ikan mas 18.500 ekor
  - d. Benih ikan patin 50.000 ekor
  - e. Benih ikan koi 2000 ekor

- f. Benih ikan baster 100.000 ekor
  - g. Benih ikan lele 10.000 ekor
  - h. Pakan 500 kg
  - i. Peralatan budidaya 10 paket, masing-masing paket terdiri dari :
    - Hapa ukuran 3 x 2 x1 sebanyak 1 unit
    - Hapa ukuran 2 x 2 x 1 sebanyak 1 unit
    - Serok sebanyak 2 buah
    - Lambit sebanyak 2 buah
    - Grading sebanyak 2 buah
    - Literan sebanyak 1 buah
    - Sirib sebanyak 2 buah
7. Fasilitasi Kontes Ikan Hias dengan alokasi anggaran sebesar Rp 120.000.000,- terealisasi sebesar Rp116.334.000,- atau 96,95%, dengan keluaran sebagai berikut:
- a. Keikutsertaan Pembudidaya dalam Kontes Ikan Koi 9 kali
  - b. Fasilitasi Kontes Ikan Koi 1 kali
8. Peningkatan Produktifitas Kelautan dan Perikanan melalui PIK dengan alokasi anggaran sebesar Rp 36.450.000,- terealisasi sebesar Rp35.949.000 atau 98,6%, dengan keluaran sebagai berikut:
- a. Sarana Budidaya Ikan Untuk Desa Cisaat Kec. Cisaat 1 Paket yang terdiri dari :
    - benih ikan nila nirwana 50.000 ekor
    - pakan dedak 150 kg
    - pakan benih 150 kg
  - b. Saran Budidaya Ikan Untuk Desa Sukamantri Kec. Cisaat 1 Paket yang terdiri dari :
    - induk ikan lele sangkuriang 10 paket ( 100 ekor betina, 50 ekor jantan)
    - pakan induk 200 kg
  - c. Sarana Budidaya Ikan Untuk Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh 1 Paket
    - benih ikan gurame 1.980 ekor

- pakan benih 50 kg

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan yang diselenggarakan dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan terdiri dari 13 (Tiga Belas) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.538.674.179,- dan terealisasi sebesar Rp 3.465.916.807,- atau 97,94%. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diversifikasi Produk Perikanan dan Diversifikasi Kemasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 119.758.000,- realisasi sebesar Rp 119.718.000,- atau 99,97% dengan keluaran sebagai berikut:
  - a. Pelatihan Diversifikasi Produk Perikanan di Desa Caringin Wetan sebanyak 25 peserta.
  - b. Pelatihan Diversifikasi Produk Perikanan di Sentra Fish Jelly Lembursitu sebanyak 25 peserta.
  - c. Pelatihan Diversifikasi Kemasan di Palabuhanratu sebanyak 25 UMKM.
  - d. Bantuan Kemasan untuk 5 UMKM.
  - e. Operasional Rumah Kemasan selama 1 (satu) tahun.
  
8. Identifikasi, Verifikasi dan Validasi SeHAT, Listrik Nelayan dan Rutilahu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 426.051.000,- realisasi sebesar Rp 426.051.000,- atau 100,00% dengan keluaran sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi Asuransi Nelayan 20x sebanyak 30 Peserta
  - b. Pembinaan PKN dan Pembudidaya Ikan 5x sebanyak 30 Peserta
  - c. Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Pembudidaya Ikan 2x sebanyak 30 Peserta
  - d. Sosialisasi Asuransi Nelayan pembuatan kartu Asuransi Nelayan 1x sebanyak 30 Peserta
  - e. Rakor Pendistribusian Beras Nelayan 1x sebanyak 50 Peserta
  
9. Pengembangan Inkubator Mina Bisnis dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.900.000,- realisasi sebesar Rp 16.900.000,- atau 100,00% dengan keluaran sebagai berikut:
  - a. Biaya Listrik 1 Paket.
  - b. Biaya Piket 12 bulan.



10. Pengembangan Jaringan dan Distribusi Pemasaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 256.850.000,- realisasi sebesar Rp 256.680.000,- atau 99,93 % dengan keluaran sebagai berikut :
  - a. Kampanye GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dengan peserta 300 orang.
  - b. Kaji terap pengembangan pemasaran ke Medan selama 5 hari sebanyak 16 orang
  - c. Pameran pembangunan hari jadi Kabupaten Sukabumi selama 8 hari di Palabuhanratu
  - d. Operasional pusat promosi non konsumsi selama 1 tahun
  - e. Pameran BBGRM di Cisolok selama 5 hari
  
11. Peningkatan Kelembagaan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 121.685.000,- realisasi sebesar Rp 121.285.000,- atau 99,67% dengan keluaran sebagai berikut:
  - a. Bintek Peningkatan Kelembagaan bagi Pelaku Usaha Perikanan 2x sebanyak 50 peserta.
  - b. Penilaian Lomba Kelompok tingkat Kabupaten Pra adibhakti 1x sebanyak 25 peserta
  - c. Bintek Rapat Anggota Tahunan untuk Koperasi 2x sebanyak 50 peserta.
  - d. Sosialisasi Pembuatan Kartu Pelaku Usaha Perikanan ( KUSUKA ) 2x sebanyak 50 peserta<sup>10</sup>
  
12. Peningkatan Mutu Produk Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60.434.000,- realisasi sebesar Rp 58.224.000,- atau 96,34 % dengan keluaran sebagai berikut :
  - a. Pembinaan Sertifikasi Pengolahan Ikan sebanyak 1 (satu) kali 25 UMKM di Desa Bantargadung
  - b. Sosialisasi PIRT dan Halal bagi pelaku usaha perikanan di Desa Bantargadung peserta 25 UMKM
  - c. Sosialisasi PIRT dan Halal bagi pelaku usaha perikanan di Palabuhanratu peserta 25 UMKM
  - d. Pengujian Nutrisi Produk sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk produk bakso ikan
  - e. Pembinaan Penanganan Ikan sebanyak 1 (satu) kali / 25 UMKM di Kecamatan Ciracap

13. Revitalisasi pasar Ikan Cibaraja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.291.000.000,- realisasi sebesar Rp 289.002.000,- atau 99,31 % dengan keluaran sebagai berikut :
  - a. Pembinaan pedagang di Pasar Ikan di Pasar Ikan Cislolok sebanyak 2 (dua) kali, peserta 90 orang
  - b. Pembinaan pedagang di Pasar Ikan di Pasar Ikan Cibaraja sebanyak 2 (dua) kali, peserta 120 orang
  - c. Pembinaan pedagang di Pasar Ikan di Pasar Ikan Ciwaru sebanyak 2 (dua) kali, peserta 100 orang
  - d. Pembinaan pedagang di Pasar Ikan di Pasar Ikan Ujunggenteng sebanyak 2 (dua) kali, peserta 90 orang
  - e. Pembinaan pedagang di Pasar Ikan di Pasar Ikan Minajaya sebanyak 2 (dua) kali, peserta 60 orang
  - f. Bazar Produk Kelautan dan Perikanan selama 4 hari di Pasar Ikan Cibaraja
  
14. Pembangunan Pasar Ikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 205.000.000,- realisasi sebesar Rp 203.902.000,- atau 99,46 % dengan keluaran sebagai berikut :
  - a. Rehab Pasar Ikan Ujunggenteng sebanyak 1 (satu) paket.
  
15. Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Reguler 2017) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.303.000.000,- realisasi sebesar Rp . 1.252.796.000,- atau 96,15% dengan keluaran sebagai berikut:
  - a. Rehab Kolam/Bak Pendederan Intensif 1 Paket
  - b. Rehab Hatchery Outdoor 1 Paket
  - c. Rehab Kolam Blok A dan B 1 Paket
  - d. Rehab Gudang Pakan 1 Paket
  - e. Rehab Jalan dan Saluran Sekitar Kolam 1 Paket
  - f. Rehab WC dan Lantai TPI Ciwaru 1 Paket
  
16. Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Pendamping) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.575.000,- realisasi sebesar Rp 32.240.000,- atau 98,97% dengan keluaran sebagai berikut:
  - a. Konsultan Pengawas 1 Paket
  - b. Dokumen Pengawasan 1 Dokumen

17. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan (SILPA DAK 2016) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.871.679,- realisasi sebesar Rp 75.334.000,- atau 99,29% dengan keluaran sebagai berikut:
  - a. Pemasangan Paving Block TPI Ciwaru 1 Paket
  - b. Rehab WC TPI Ciwaru 1 Unit
  
18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp 497.942.000,- terealisasi sebesar Rp 482.177.307,- atau 96,83%, dengan keluaran ini adalah:
  - a. Renja SKPD 2018
  - b. RKA 2018 1 Dokumen
  - c. RKAP 2017 1 Dokumen
  - d. DPPA 2017 1 Dokumen
  - e. DPA 2018 1 Dokumen
  - f. Dokumen Revisi RENSTRA 1 Dokumen
  - g. Dokumen Revisi Renja 1 Dokumen
  - h. Peserta Rakor Perencanaan 1 Kali
  - i. Jasa Konsultansi deliniasi kawasan perikanan
  
19. Penyusunan IKM dan Data Statistik Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran Rp 131.607.500,- terealisasi sebesar Rp 131.607.500,- atau 100,00%, dengan keluaran ini adalah:
  - a. Peserta Bimbingan teknis metode statistic 1 Kali/39 Orang
  - b. Buku statistic 1 Dokumen
  - c. Laporan IKM 1 bDokumen
  - d. Peserta Rakor Validasi Data Statistik 1 Kali/44 Orang

Dari segi Pendapat Asli Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2017 menargetkan pendapatan sebesar Rp. 387.490.000,- tercapai sebesar Rp. 428.454.658,- atau sebesar 111%. Pencapaian ini didapat dari Retribusi Pelayanan Pasar Ikan Rp. 40.901.000,-, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp. 282.591.658,-, Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah Balai Benih Ikan Rp. 104.962.000,- Selengkapnya data mengenai PAD dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan  
Tahun Anggaran 2017

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>387.490.000</b>	<b>428.454.658</b>	<b>111</b>
1	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	250.000.000	282.591.658	113
2	Retribusi Balai Benih Ikan (BBI)	100.000.000	104.962.000	105
3	Retribusi Pasar Ikan	37.000.000	40.901.000	109

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Pelayanan bidang kelautan dan perikanan mengacu kepada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.44/MEN/2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kota. Terdapat delapan jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi yaitu :

- a. Memberikan Rekomendasi Teknis Perizinan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kelautan dan Perikanan
- c. Menyelenggarakan Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kelautan dan Perikanan
- d. Menyelenggarakan Peningkatan Kualitas Hasil Perikanan
- e. Menyediakan Data dan Informasi Kelautan dan Perikanan
- f. Menyelenggarakan Bimbingan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
- g. Menyediakan Informasi Peluang Usaha dan Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan
- h. Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Penerapan teknologi Penangkapan Ikan, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan

Untuk dapat menyelenggarakan seluruh jenis pelayanan minimal yang ditetapkan diperlukan adanya peraturan bupati sebagai pedoman pelaksanaannya, untuk itu perlu dibuat SK Bupati mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. Selain aspek legalitas diatas adanya dukungan anggaran yang memadai dan petugas yang memiliki kompetensi dibidangnya mutlak diperlukan. Pada tahun 2015 Pencapaian SPM sesuai KEPMEN/44/2004 belum dilakukan pengukuran secara akurat, namun secara umum dari kedelapan jenis pelayanan dasar tersebut sudah dilakukan.

Hal-hal yang diperlukan dalam upaya pengembangan pelayanan adalah :

1. Peningkatan tingkat kompetensi dan pemahaman pejabat berwenang terhadap SPM dan peraturan kerja yang berkaitan dengannya
2. Sosialisasi KEP MEN No. 44/MEN/2004 tentang SPM Bidang Kelautan dan Perikanan terhadap aparat Pembina maupun masyarakat perikanan pada umumnya
3. Tersedianya pegawai struktural maupun fungsional yang memiliki kompetensi sesuai yang dibutuhkan (pengawas mutu, Pengawas hama penyakit, pengawas budidaya,
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pencapaian SPM seperti Lab Mutu Hasil Perikanan, Lab Hama Penyakit Ikan, BBI, UPR
5. Identifikasi dan penetapan kawasan budidaya dan reservat
6. Identifikasi dan penetapan lokasi pemeriksaan (check point)
7. Pengalokasian tenaga penyuluh perikanan pada setiap wilayah kerja penyuluh perikanan
8. Informasi peluang usaha dan investasi bidang kelautan dan perikanan

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sukabumi dihadapkan pada berbagai masalah. Sumberdaya kelautan dan perikanan dalam satu dekade terakhir ini cenderung mengalami degradasi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Beberapa faktor penyebabnya antara lain aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran di air laut maupun perairan daratan, penangkapan ikan dengan bahan peledak, alat tangkap yang dilarang, penangkapan ikan secara berlebihan, perusakan terumbu karang dan hutan mangrove. Selain faktor yang disebabkan oleh manusia kekurangtersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga turut berpengaruh terhadap

rendahnya produktivitas kelautan dan perikanan. Secara nasional armada perikanan tangkap masih menggunakan perahu tanpa motor, motor temple dan kapal perikanan berukuran 0.5 – 3 GT yang mempunyai hari layar yang singkat (*one day fishing*), daya jelajah terbatas, daya tampungnya juga terbatas. Begitu pula dengan teknologi budidaya dan pengolahan hasil perikanan, dimana tingkat kerusakan dan kehilangan mutu ikan masih cukup tinggi.

Berikut ini identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi seperti terlihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Aspek kajian	Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Factor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Kepegawaian	Masih kurangnya pegawai dengan latar belakang/kompetensi yang sesuai dengan bidang kelautan perikanan	Jumlah pegawai dengan latar belakang kelautan perikanan	Kurangnya pendidikan/pe latihan kompetensi bagi aparaturnya	Terbatasnya dana	Terbatasnya jumlah personil di daerah
Produksi kelautan dan perikanan	Produksi perikanan tangkap menurun	Data statistik kelautan dan perikanan	Kurangnya sosialisasi tentang alat tangkap yang ramah lingkungan	Budaya “salawean” penangkapan impun tiap tanggal 25 bulan komariah	Terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan
			Alat tangkap yang digunakan masih tradisional dengan teknologi yang terbatas		
	Produksi perikanan budidaya menurun	Data statistik kelautan dan perikanan	Teknologi budidaya masih relative sederhana	Berkurangnya areal budidaya	
				Menurunnya kuantitas dan kualitas air budidaya	
Pelestarian	Adanya eksploitasi		Kurangnya pengawasan	Masih adanya pencurian telur	Belum tersedia

Aspek kajian	Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Factor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
n sumber daya kelautan dan perikanan	wilayah pesisir yang berlebihan		dan sosialisasi kepada aparaturnya dan masyarakat	penyu	ya perangkat hukum yang berkaitan dengan regulasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
			Lemahnya penegakan hukum	Adanya ancaman penyerobotan lahan oleh masyarakat	
	Belum adanya Perda mengenai pemanfaatan wilayah pesisir serta Pewilayahan pengembangan kelautan dan perikanan belum terkoordinasi dengan baik		Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait	Belum terimplementasinya RTRW dan payung hukum tentang pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir	
Mutu produk kelautan dan perikanan	Tingkat kerusakan hasil kelautan dan perikanan masih cukup tinggi dengan mutu yang rendah		Belum diterapkannya sistem rantai dingin di atas kapal, kolam, tambak, TPI, tempat penampungan dan tempat pengolahan		
Konsumsi ikan perkapita	Tingkat konsumsi ikan perkapita masih rendah		Masih rendahnya sosialisasi gemar makan ikan bagi masyarakat	Gaya hidup masyarakat yang konsumtif sehingga lebih memilih menjual ikan untuk hal yang bersifat konsumtif daripada dikonsumsi sendiri	Masih terbatasnya data/sumberdata dari lokasi



Aspek kajian	Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Factor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
			Masih kurangnya diversifikasi produk kelautan dan perikanan		

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 adalah dokumen rencana tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, Serta Prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif.

Tahapan penyusunan RKPD diawali dengan penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh PD yang ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan Musrenbang. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016 – 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi melaksanakan 3 program unggulan yaitu :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan
2. Program Pengembangan Perikanan tangkap
3. Program pengembangan budidaya perikanan

Selain Program-program unggulan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program rutin yang setiap tahun dilaksanakan, yaitu :

Program Kegiatan Rutin:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi beorientasi kepada masyarakat dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil musrenbang di tingkat desa sampai kabupaten secara umum dapat terakomodir melalui program dan kegiatan yang ada, hanya tinggal menyesuaikan lokasi kegiatan berdasarkan usulan yang ada.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dijalankan dengan peneguhan kembali jalan ideologis bangsa. Ideologi itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Dengan demikian, prinsip dasar Trisakti menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan nasional 5 (lima) tahun kedepan, termasuk pembangunan kelautan dan perikanan.

Penjabaran Trisakti diwujudkan dalam bentuk:

1. Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.
3. Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Ideologi TRISAKTI menggambarkan bahwa pembangunan dicapai melalui perwujudan bangsa yang (1) *berdaulat*, yaitu bangsa yang mampu hidup sejajar dan sederajat dengan bangsa lain, hal ini dicapai melalui peningkatan kemampuan berdaya saing; (2) *Mandiri*, yaitu berkurangnya ketergantungan dari sumberdaya luar negeri melalui ketersediaan manusia yang berkualitas dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara terpadu dan ramah lingkungan; (3) *Berkepribadian dan berkebudayaan*, yaitu menyadari jati

diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan bangsa maritim, serta menempatkan maritim sebagai poros kekuatan untuk membangun perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ideologi TRISAKTI dalam RPJMN 2015-2019 juga menggambarkan adanya reorientasi paradigma pembangunan (*paradigm shift*), dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi.

Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis KKP 2015-2019 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L.

## A. MISI

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipungungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipungungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah “ **Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.**”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa

lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

## B. MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini,

KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

### C. TUJUAN

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

### **3.2.1 Tujuan**

Berdasarkan Visi dan Misi Kepada Daerah periode 2016-2021 Bidang Kelautan dan Perikanan memiliki tujuan, yaitu:

“Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menstimulasi usaha mikro dan menengah”



### **3.2.2 Sasaran**

Dalam rangka Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menstimulasi usaha mikro dan menengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- 1 Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan
- 2 Terwujudnya sentra perikanan budidaya

### **2.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang akan dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan pada periode renja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

##### **Kegiatan :**

- a. Pelayanan Administrasi Aset
- b. Pelayanan Administrasi Perkantoran

#### **2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

##### **Kegiatan :**

- a. Pengadaan pakaian Hari-hari tertentu

#### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

##### **Kegiatan :**

- a. Bimbingan Teknis Peningkatan Sumberdaya Aparatur

#### **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Laporan Keuangan

#### **5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

##### **Kegiatan :**

- a. Pembangunan Gedung Arsip (Lanjutan)
- b. Pembuatan Kanopi
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- f. Penataan Halaman Kantor
- g. Pengadaan Mebeulair
- h. Pengadaan Peralatan Komputer
- i. Rehabilitasi Gedung Kantor

**6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

- a. Bantuan Bibit Ikan dan Pakan Ikan
- b. Bantuan Bibit Ikan dan Pakan Ikan
- c. Bantuan Bibit Ikan dan Pakan Ikan Kp. Tipar RT 49 RW 10 Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat,
- d. Bibit Ikan Mas dan Lele
- e. Budidaya ikan air tawar
- f. Budidaya Ikan Mas (PIK)
- g. Fasilitas Gerakan Pakan Ikan Mandiri
- h. Fasilitasi Sertifikasi CPIB
- i. Pelatihan dan pembinaan
- j. Pelatihan dan pembinaan sertifikasi CBIB
- k. Pelatihan dan Pembinaan Sertifikasi CPIB
- l. Pelatihan Peningkatan SDM Nelayan dan Pembudidaya Ikan
- m. Pelatihan SDM dalam pengelolaan kualitas lingkungan budidaya
- n. Pembangunan Balai Benih Ikan Tonjong
- o. Pengelolaan Balai Benih Ikan
- p. pengembangan HSRT
- q. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan berbasis perikanan budidaya
- r. Pengembangan sapsras pembudidaya ikan hias
- s. pengembangan sapsras usaha pembesaran ikan
- t. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- u. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan
- v. Peningkatan kapasitas budidaya ikan hias
- w. Perbaikan Kualitas Induk Ikan

- x. Perbaiki Kualitas Induk Ikan Hias
- y. Restocking Ikan di Perairan Umum Daratan
- z. Rumah Ikan

#### **7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

- a. Dermaga Perikanan Samudra
- b. Fasilitasi Rekomendasi SIUP dan SIKPI
- c. Kaji terap penangkapan ikan, pengelolaan TPI
- d. Pemanfaatan dan Pemulihan Sumberdaya Kelutan dan Perikanan secara terpadu dan berkelanjutan
- e. Pembentukan Pokmaswas Perairan darat
- f. Pembuatan Talud Minajaya
- g. Pencatatan armada penangkap ikan
- h. Pengadaan alat bantu penangkapan ikan
- i. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan
- j. Pengadaan Sarana Untuk Nelayan
- k. Pengadaan Sarana unutm nelayan (DBH Pajak Rokok 2018)
- l. Pengelolaan TPI
- m. Peningkatan kapasitas nelayan
- n. Peningkatan Kapasitas Nelayan (DBH Pajak Rokok 2018)
- o. Penyediaan Sarana dan Prasarana TPI
- p. Rehab Kios TPI Minajaya
- q. Rumah Ikan
- r. Rumpon Laut Dangkal
- s. Rumpon Laut Dangkal TPI

#### **8. Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan**

- a. Bantuan Keuangan Provinsi
- b. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan
- c. Diversifikasi Produk Perikanan dan Diversifikasi Kemasan
- d. Identifikasi Verifikasi dan Validasi SeHAT, Listrik dan Rutilahu
- e. Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Ikan
- f. Pembinaan dan Penilaian Kelompok
- g. Pembinaan Kehidupan Nelayan, Pokdakan dan Poklahsar

- h. Penciptaan Pelaku usaha Baru
- i. Pendampingan Asuransi Nelayan
- j. Pengelolaan Pasar Ikan
- k. Pengembangan jaringan dan Distribusi Pemasaran
- l. Peningkatan Kapasitas Pembudidaya Ikan
- m. Peningkatan Kapasitas Produksi Produk Perikanan
- n. Peningkatan Kelembagaan UMKM
- o. Peningkatan Mutu Produk Perikanan
- p. Peningkatan Produktivitas Perikanan
- q. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelautan dan Perikanan
- r. Penyusunan IKM dan Data Statistik Kelautan dan Perikanan
- s. Rakor BBM Bersubsidi
- t. Revitalisasi Pasar Ikan Cibaraja
- u. Sosialisasi Asuransi Nelayan

**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 VISI DAN MISI**

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat yang memiliki berbagai sumber daya alam beranekaragam termasuk kebudayaan masyarakat yang cukup kental dan berkarakter kuat. Potensi-potensi tersebut merupakan salah satu modal berharga bagi setiap pelaksana pembangunan daerah untuk memulai rangkaian program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan rakyat akan terbangun secara konsisten dan merata jika segenap insan di Kabupaten Sukabumi berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kemampuan dirinya untuk mandiri sekaligus berdaya saing sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menggapai cita-citanya yakni meningkatnya taraf kehidupan keluarga secara sosial ekonomi dalam masyarakat.

Memasuki periode pembangunan jangka menengah kepala daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan (dalam hal ini pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021).

#### 4.1.1 VISI

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”**

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat seperti yang tergambar pada gambar berikut.

**Gambar 1.**  
**Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan**  
**Kabupaten Sukabumi**



## **1. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius**

Pembangunan Kabupaten Sukabumi merupakan proses perubahan yang direncanakan dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Proses perubahan tersebut mencakup sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, hingga budaya daerah.

Dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi, aspek yang penting untuk diperhatikan perkembangannya adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

Elemen visi pembangunan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius pada intinya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang bermartabat dan berdaya saing.

Sementara itu, religius juga mengandung wujud makna toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap manusia sebagai umat beragama yang mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Sebab kita ketahui bahwa Kabupaten Sukabumi

dengan mayoritas penduduk beragama Islam harus memiliki sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Sehingga makna toleransi dalam pembangunan dapat diartikan sebagai pembangunan yang menyentuh semua komponen masyarakat.

## **2. Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi**

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandanginya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya kemandirian merupakan usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Dalam konteks peningkatan daya saing sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya optimal untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Pembangunan Kabupaten Sukabumi dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional.

Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan



oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi akan menjadi cerminan utuh dan menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Hal ini dikarenakan visi pembangunan daerah memberi penekanan pada peningkatan kualitas dan daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Kemandirian masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Bupati Sukabumi, ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (*empowerment*). Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan *power sharing* agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders lainnya, dan untuk mengoptimalkannya dilakukan dengan *information sharing* agar pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain.

Pemberdayaan sendiri pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemberdayaan dapat membuat masyarakat lebih mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu pemberdayaan dapat membantu pencapaian ke empat misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu kemandirian ekonomi (misi 1), sumber daya manusia yang berdaya saing (misi 2), tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (misi 3) dalam hal ini berkaitan dengan peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan optimalisasi pelayanan dasar (misi 4).

#### **4.1.2 Misi**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the chosen track*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Misi Kepala daerah yang selaras dengan bidang kelautan dan perikanan adalah misi pertama yaitu “meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan dengan tujuan

Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan.

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelaku Usaha Perikanan
2. Meningkatkan Produksi Nilai Tambah Produk serta sarana dan Prasarana perikanan

#### **4.3 Sasaran Strategi dan Kebijakan**

Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku perikanan
2. Terwujudnya sentra perikanan budidaya

Dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai strategi yang dilaksanakan adalah :

1. Mendorong produksi perikanan
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelaku Usaha Perikanan
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan
4. Pengembangan Kawasan Minapolitan

Dengan Kebijakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan nilai produksi perikanan
2. Sertifikasi Produk Perikanan
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan
4. Diseminasi Teknologi Usaha Perikanan
5. Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan
6. Penetapan kawasan melalui peraturan Bupati

Tabel 5. Tujuan Sasaran, Strategi, Program dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program	Kebijakan
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menstimulasi usaha mikro dan menengah	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan	1) Mendorong produksi perikanan; 2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelaku Usaha Perikanan; 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan	Program peningkatan kesejahteraan pelaku Perikanan	1).Mengembangkan nilai produksi perikanan; 2) Sertifikasi Produk Perikanan; 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan; 4) Diseminasi Teknologi Usaha Perikanan; 5) Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
	Terwujudnya sentra perikanan budidaya		Program Pengembangan Perikanan Budidaya	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kegiatan pembangunan di berbagai sektor, pada dasarnya merupakan upaya nyata yang diarahkan pada pencapaian Visi dan Misi Daerah. Berkenaan hal tersebut, rumusan Rencana Strategis dan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, merupakan implementasi penjabaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi merupakan kerangka acuan operasionalisasi kegiatan-kegiatan prioritas selama tahun 2018. Dengan demikian seluruh rangkaian kegiatan (sesuai dengan kebijakan program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD), akan mencapai hasil optimal apabila dapat terselenggara secara terkoordinasi, terintegrasi dan ketersediaan daya dukung alokasi anggaran sesuai dengan perencanaan.

Palabuhanratu, Juli 2018

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Sukabumi**



**Ir. H. DADANG BUDIMAN, MM**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 196305031988031008